

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Fenomena wabah baru bernama Covid-19 dari Wuhan China saat ini tengah menggejarkan dunia. Penyebarannya sangat cepat sehingga menelan banyak korban jiwa baik tenaga medis maupun anggota masyarakat. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi Virus Covid-19 dari hari ke hari yang sulit dikendalikan, mengharuskan pemerintah untuk memiliki rencana yang jelas dan sederhana dalam menanggapi masalah ini. Virus ini dapat menyerang baik hewan maupun manusia, dan pada manusia gejala yang muncul berupa infeksi mirip dengan SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 lebih masif perkembangannya (Yuliana, 2020).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkena wabah ini. Oleh karena itu diperlukan tindakan pemerintah dan kesadaran penuh masyarakat untuk menekan angka penyebaran Virus Covid-19. WHO (*World Health Organization*) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan Virus Corona menjadi pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 yang sudah menyebar di seluruh belahan dunia.

Pada hari Sabtu tepatnya tanggal 16 Oktober 2021, berdasarkan data Covid yang diakses melalui Covid.go.id jumlah kasus penderita Virus Corona yang terkonfirmasi di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 4.234.011 jiwa, sembuh 4.072.332 dan meninggal sebanyak 142.933 (<https://covid19.go.id> diakses pada tanggal 16 Oktober 2021).

Dalam penanganan pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*).

Hal ini membuat berkurangnya aktivitas masyarakat, dan mendorong mereka untuk tinggal di rumah dan melakukan aktivitas dan pekerjaannya dari rumah. Selain telah mengganggu aktivitas masyarakat, keberadaan Covid-19 ini juga telah membuat sebagian besar para buruh kehilangan pekerjaannya (PHK).

Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan pada 7 April 2020, pekerja yang paling banyak di PHK dan dirumahkan datang dari sektor formal, di mana sebanyak 1,1 juta pekerja dirumahkan dan PHK oleh total 39.977 perusahaan. Sementara, 189.452 pekerja sektor informal di PHK dan dirumahkan oleh 34.453 perusahaan.

Pemerintah perlu mencatat bahwa korban PHK dan dirumahkan tidak memiliki sumber pendapatan untuk waktu yang belum bisa ditentukan, setidaknya hingga perekonomian mulai bangkit. Dengan tidak adanya pendapatan, kelompok ini rentan masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Dengan demikian, baik pekerja informal maupun pekerja yang di PHK dan dirumahkan, berpotensi sangat besar masuk ke dalam garis kemiskinan. Tidak adanya lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi membuat dependensi tinggi terhadap bantuan sosial dari pemerintah dan donasi. Kebutuhan ini berskala besar, menimbang banyaknya jumlah pekerja informal dan korban PHK di Indonesia

ditambah rumah tangga yang sudah tergolong miskin dari sebelum pandemi. Otomatis, besaran nominal dan jumlah bantuan sosial yang dibutuhkan pun semakin tinggi, karena menurunnya pendapatan mereka secara drastis.

Per tanggal 13 April 2020 Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) menyampaikan kembali tingkat pengangguran meningkat sebanyak 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi Covid-19. 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan, 749,4 ribu pekerja formal yang di PHK, 282 ribu pekerja informal yang usahanya terganggu dan 100 ribu pekerja migran yang dipulangkan.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada karyawan buruh pabrik, masa pandemi juga berdampak pada kehidupan perempuan (ibu rumah tangga), anak, lansia dan penyandang status disabilitas. Dampak pandemi yang dirasakan oleh anggota kelompok rentan ini adalah antara lain, pendapatan berkurang karena PHK, daya beli masyarakat yang menurun, kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menanggulangi hal di atas pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa pemberian bantuan sosial (Bansos) paket sembako yang dibagikan oleh Kementerian Sosial kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Pembagian bantuan sosial ini dimulai pada tahun 2020 hingga sampai waktu ini tahun 2021.

---

<sup>1</sup> Dwi Hadya Jayani. 2022. Web D Katadata 18 April 2022, 09:26. (Diakses pada 14 Januari 2022).

Menteri sosial Juliari Peter Batubara menekankan bahwasannya bantuan sosial terkait Covid-19 hanya dibagikan pada mereka (masyarakat) yang terkena dampak pandemi Covid-19, dan akan tercatat sebagai penerima bantuan regular, penyaluran bantuan sosial ini akan berhenti usai pandemi Covid-19 berakhir.

Beberapa bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 seperti 1) bantuan sembako pangan yang disalurkan dalam bentuk non-tunai yang berasal dari pemerintah pusat dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat (KPM) melalui mekanisme uang elektronik. bantuan sosial ini dibagikan pada rakyat DKI Jakarta dan wilayah sekitar Sejabodetabek.

Bantuan sosial sembako DKI Jakarta dibagikan kepada masyarakat 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga sebesar Rp 600.000 dan diberikan selama 3 bulan, untuk bantuan sembako wilayah Bodetabek dibagikan 1,6 juta jiwa atau setara dengan 576.000 keluarga dengan jumlah nilai yang sama yaitu Rp 600.000 dan diberikan selama 3 bulan.

Jadi total terdapat 4,2 juta jiwa rakyat pada wilayah Jabodetabek sebagai penerima bantuan sosial sembako. Jadi total keseluruhan nilai sembako yang diterima warga selama tiga bulan, dimulai dari bulan April, Mei, Juni 2020 yaitu sebesar Rp 1,8 juta. Namun pada bulan Desember mendatang nilainya akan berkurang menjadi Rp 300.000 perbulannya 2) bantuan sosial tunai ini dibagikan dalam bentuk uang, sasarannya adalah masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Program bansos tunai ini dimulai pada masa timbulnya masalah Covid-19 di

Indonesia. Hal yang berbeda dari bantuan sosial ini adalah menasar pada warga diluar jabodetabek sebanyak RP 600.000 perbulanya dan ditransfer secara langsung ke rekening penerima bantuan sosial. 3) BLT dana desa ini dibagikan kepada mereka masyarakat miskin, yang tidak berkecukupan.

Tujuan pemberian bantuan sosial BLT dana desa ini untuk mengurangi dampak Covid-19 yang menimpa keluarga mereka, dengan jumlah nilai yang mereka terima pada awalnya Rp 600.000, namun sekarang tinggal Rp 300.000 perbulannya. 4) listrik gratis ini salah satu kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Pemerintah memberikan listrik gratis atau semacam pembebasan tagihan listrik, dengan total anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 15,39 triliun, dan pelanggan yang mendapatka subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA dan 900 VA. 5) kartu prakerja ini digunakan dalam rangka acara pelatihan kerja (training) bagi mereka masyarakat yang tidak memiliki keterampilan.

Tujuan diberikannya kartu ini untuk menolong para buruh yang terkena dampak pandemi Covid-19. 6) pembagian subsidi gaji karyawan ini dilakukan dengan cara transfer ke alamat rekening si penerima bantuan sosial, penerimaan bantuan sosial subsidi gaji karyawan ini tidak lain mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19. 7) Terakhir pembagian bantuan sosial BLT usaha mikro kecil kepada para pedagang atau pengusaha kecil, bantuan sosial ini di khususkan untuk mereka para pelaku bisnis kecil-kecilan, berupa dana sosial gratis yang berasal dari pemerintah. Roy Morado (2021).

Tabel 1. Rekapitulasi Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2020

N O	KELURAHAN/DESA	PROGRAM KELUARGA HARAPAN RI		PROGRAM SEMBAKO RI		PROGRAM SEMBAKO PERLUASAN (KKS COVID-19) RI		BANTUAN TUNIA DAN NON TUNAI GUBENUR JAWA BARAT		BANTUAN PAKET SAMBAKO PEMERINTAH, KABUPATEN BEKASI		USULAN CALON PENERIMA MANFAATBANSOS TUNAI KEMENSOS RI		JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		DTKS	NON DTKS	DTKS	NON DTKS	DTKS	NON DTKS	DTKS	NON DTKS	DTKS	NON DTKS	DTKS	NON DTKS	DTKS	NON DTKS	
1	CIKARANG KOTA	313	-	457	-	408	-	83	150	-	351	12	694	1273	1195	2468
2	HARJAMEKAR	53	-	82	-	192	-	136	684	-	329	4	1	467	1014	1481
3	KARANGASIH	373	-	593	-	701	-	127	51	-	152	37	27	1831	230	2061
4	KARANGBARU	165	-	277	-	245	-	117	48	-	139	7	1	831	188	1019
5	KARANGRAHARJA	379	-	568	-	325	-	51	1	-	2318	12	4	1335	2323	3658
6	MEKARUKTI	126	-	233	-	180	-	63	124	-	620	3	2	605	746	1351
7	PASIR GOMBONG	91	-	141	-	505	-	437	81	-	706	31	4	1205	791	1996
8	SIMPANGAN	158	-	287	-	132	-	50	729	-	1382	4	4	631	2115	2746
9	TANJUNGSARI	207	-	339	-	254	-	29	13	-	370	18	5	847	388	1235
10	WALUYA	168	-	251	-	338	-	75	29	-	1858	29	-	861	1887	2748
11	WANGUNHARJA	97	-	193	-	234	-	120	-	-	674	5	-	649	674	1323

Sumber: Dinas sosial kabupaten Bekasi

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Manfaat Bantuan Sosial Bagi Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Masa Pandemi Covid-19 (Oktober 2021 – Januari 2022), Studi Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti ingin merumuskan masalah dari topik penelitian ini dengan judul manfaat bantuan sosial terhadap korban PHK di masa pandemi Covid-19, studi kasus Desa Karangasih Cikarang Utara dengan rumusan masalah:

- a. Seberapa besar manfaat bantuan sosial dalam menopang biaya hidup keluarga korban PHK dalam satu bulan di era pandemi?
- b. Apa saja faktor faktor yang mendorong kepuasan dan ketidakpuasan penerima bantuan sosial Covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. untuk mengetahui besarnya manfaat bantuan sosial dalam menopang biaya hidup keluarga korban PHK dalam satu bulan di era pandemi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kemanfaatan dan ketidakmanfaatan bantuan sosial.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapka penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung pada bidang Sosiologi. Dengan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritik dapat mengembangkan konsep-konsep dalam mata kuliah kebijakan sosial seperti bantuan sosial dan manfaat program bagi kelompok sasaran.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi pada program studi Sosiologi

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari Lima bab yang disertai dengan beberapa sub-bab. Berikut adalah penjelasan sistematika penulisan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Universitas Nasional.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kedua menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan, pengertian kajian Pustaka, teori, konsep-konsep dan kerangka berpikir.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga membahas tentang metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitiannya, seperti Teknik pengumpulan data, analisis data, wawancara dan observasi.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab keempat membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk, Pendidikan penduduk, wilayah, kondisi social ekonomi, umur penduduk, mata pencaharian penduduk, deskripsi informan dan manfaat bantuan sosial.

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab Lima berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.

